



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN ANTAPANI TENGAH KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG

Ine Mariane^{1*)}, Mira Rosana Gnagey², Muaddah Asad Mohamad Ibrahim Karali³, Elsa Hardiyanti⁴

¹ Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
ine.mariane@unpas.ac.id

² Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
mira.rosana@unpas.ac.id

³ Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Muaddah1212@gmail.com

⁴ Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Elsahardiyanti11@gmail.com

ABSTRAK

Sampah di kota Bandung menjadi isu yang perlu diselesaikan bersama oleh sektor pemerintah, akademisi, hingga komunitas. Sebanyak 1.500 ton sampah dihasilkan setiap harinya di Kota Bandung atau 0,63 kg tiap orang per hari. Pandangan terhadap sampah perlu diubah dari 'permasalahan' menjadi 'potensi' melalui sistem pengelolaan sampah dari rumah yaitu dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya agar sampah tidak tercampur dan memudahkan penanganan lebih lanjut melalui Bank sampah, sehingga sampah yang masuk ke TPA hanya tersisa residu saja. Tujuan penelitian menganalisis kebijakan pemerintah kota Bandung dan mengetahui Model Jejaring Kebijakan dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung Metode yang digunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan fenomenologi. Sumber data Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pengelola Bank Sampah, tim peneliti. Data dikumpulkan dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Keabsahan dan kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data berupa pengumpulan, reduksi, dan penyajian data, serta penarikan Kesimpulan Hasil analisis 1) standar dan sasaran kebijakan jelas 3) sikap para pelaksana baik respon maupun pemahaman belum cukup baik, 4) lingkungan ekonomi, sosial, politik belum optimal baik sumber anggaran, Sosialisasi. Faktor penghambat yaitu pimpinan kewilayahan, kurang kontrol, partisipasi warga. Simpulan; Model Jejaring Kebijakan Laba-laba sangat sesuai dipakai dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kelurahan Antapani Tengah kecamatan Antapani kota Bandung.

Kata kunci: jejaring kebijakan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat

ABSTRACT

Waste in the city of Bandung is an issue that needs to be resolved together by the government, academics, and community sectors. As many as 1,500 tons of waste are produced every day in the city of Bandung or 0.63 kg per person per day. The view of waste needs to be changed from a 'problem' to a 'potential' through a waste management system from home, namely by separating waste based on its type so that the waste is not mixed and facilitates further handling through the Waste Bank, so that the waste that enters the TPA only leaves residue. The purpose of the study was to analyze the policies of the Bandung city government and determine the Policy Network Model in efforts to manage waste based on the community in Antapani Tengah Village, Antapani District, Bandung City. The method used was a qualitative approach through literature studies and phenomenology. Data sources Head of the Environment and Sanitation Service, Waste Bank Manager, research team. Data were collected through Interviews, Observations, and Documentation. The validity and credibility of the data used source triangulation techniques. Data analysis techniques in the form of data collection, reduction, and presentation, as well as drawing conclusions from the analysis results 1) clear policy standards and targets 3) the attitude of the implementers, both in terms of response and understanding, is not good enough, 4) the



economic, social, and political environment is not optimal, both in terms of budget sources, socialization. Inhibiting factors are regional leaders, lack of control, and community participation Conclusion; The Spider Policy Network Model is very suitable for use in community-based waste management efforts in Antapani Tengah Village, Antapani District, Bandung City.

Keywords: *policy network, community-based waste management*

PENDAHULUAN

Sampah seringkali menjadi masalah lingkungan yang harus ditangani secara serius, karena mengotori lingkungan dan membuat suasana nyaman menjadi rusak seketika karena bau yang menyengat. Walaupun sampah jelas-jelas membuat lingkungan tidak nyaman tetapi anehnya kesadaran kita terhadap lingkungan masih jauh dari cukup, masih banyak di antara kita yang tidak memperhatikan membuang sampah pada tempatnya. Mereka baru menyadari pentingnya membuang sampah secara disiplin, ketika mulai banyak lingkungan yang rusak diakibatkan oleh sampah yang menumpuk. Sampah merupakan objek yang tidak lagi mempunyai nilai dan fungsi untuk seseorang sehingga dilakukan pembuangan. Sampah sebenarnya hanya terdiri dari dua jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam seperti sisa makanan atau daun yang dapat terurai dengan mudah. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sukar untuk diurai seperti sampah berbahan plastik, karet, kaca, besi dan kaleng.

Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah adalah masalah umat manusia, ditinjau dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan dan pencemaran, apabila sampah tidak dikelola dengan baik menurut Hadiwiyoto (1983) dapat menimbulkan berbagai gangguan antara lain: 1) Sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena mengandung gas-gas yang terjadi dan rombakan sampah bau yang tidak sedap, daerah becek dan kadang-kadang berlumpur terutama apabila musim penghujan datang; 2) Sampah yang berumpuk-tumpuk dapat menimbulkan kondisi dari segi fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan lingkungan normal, yang dapat mengganggu kehidupan di lingkungan sekitarnya; 3) Disekitar daerah pembuangan sampah akan terjadi kekurangan oksigen. Keadaan ini disebabkan karena selama proses perombakan sampah menjadi senyawa-senyawa sederhana diperlukan oksigen yang diambil dari udara di sekitarnya. Karena kekurangan oksigen dapat menyebabkan kehidupan flora dan fauna menjadi terdesak; 4) Gas-gas yang dihasilkan selama degradasi (pembusukan) sampah dapat membahayakan kesehatan karena kadang-kadang proses pembusukan ada mengeluarkan gas beracun; 5) Dapat menimbulkan berbagai penyakit, terutama yang dapat ditularkan oleh lalat atau serangga lainnya; 6) Secara estetika sampah tidak dapat digolongkan sebagai pemandangannya yang nyaman untuk dinikmati. Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan dalam penanganan sampah.

Jumlah sampah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, sementara daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA) semakin lama akan berkurang karena jumlah sampah yang diproduksi tidak sejalan dengan besarnya lahan yang tersedia di TPA. Ketersediaan lahan semakin lama akan berkurang karena dimanfaatkan secara berkala, tetapi belum selaras dengan bertambahnya besaran lahan untuk pembuangan. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menciptakan kegiatan Bank Sampah yang merupakan kegiatan untuk mengelola sampah dari warga serta bisa membawa pengaruh ekonomi untuk warga dengan sistem setoran sampah yang memiliki nilai ekonomis lalu mendaur ulang dan ditukarkan dengan rupiah. Latar belakang program ini adalah hasil sampah nasional sebesar 60% asalnya dari sampah domestik, sehingga perlu dilakukan pengelolaan mulai dari sektor rumah tangga.

Gerakan membuang sampah secara disiplin pada tempat sampah semakin ramai digaungkan, tempat sampah disediakan di depan rumah, ibu-ibu mulai mengajarkan kepada anak-anak mereka sejak usia dini tentang betapa pentingnya membuang sampah dengan disiplin pada tempat yang sudah disediakan. Karena hal itu akan menjamin kebersihan lingkungan semakin sehat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Disiplin yang ditanamkan sejak usia dini akan menumbuhkan pribadi dengan karakter unggul. Sistem pengelolaan sampah di rumah adalah memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik. Untuk itu siapkanlah dua tempat sampah yang berbeda di rumah untuk dua jenis tersebut. Tempat tersebut dikhususkan untuk setiap jenis sampah agar



sampah tidak tercampur dan untuk memudahkan penanganan lebih lanjut. Cara pengelolaan sampah organik yang paling mudah adalah dengan membuatnya menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk berkebun. sementara untuk pengelolaan sampah anorganik dilakukan dengan cara mendaur ulang, seperti kertas, kardus, botol kaca, botol plastik, kaleng dan lainnya. Biasanya terdapat logo daur ulang, maka kemasan makanan tersebut dapat didaur ulang dengan membawa sampah-sampah anorganik tersebut ke pusat daur ulang sampah terdekat. Terlepas dari upaya pengelolaan sampah tersebut ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu budayakan gaya hidup *Reduce, Reuse and Recycle*.

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat dan juga kota pariwisata sekaligus kota pelajar terletak sekitar 150 km dari Jakarta ibukota Negara Republik Indonesia dan berada di koordinat 107 0 Bujur Timur dan 6 0 55' Lintang Selatan. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, penduduk kota Bandung adalah sekitar 2,5 juta jiwa dengan 1,26 juta jiwa laki-laki dan 1,24 juta jiwa perempuan (BPS, 2018). Bandung sebagai kota pariwisata dianugerahi keindahan alam dan juga peninggalan cagar budaya yang sangat banyak. Sebagai kota pelajar dan pendidikan, kota Bandung banyak mempunyai perguruan tinggi yang cukup terkemuka di Indonesia. Melihat status kota Bandung sebagai kota pariwisata dan pelajar maka wajar Kota Bandung sering dikunjungi wisatawan yang berasal dari luar baik luar kota maupun luar provinsi bahkan luar negeri. Banyaknya pendatang ini ditambah dengan penduduk kota Bandung yang memang sudah banyak tentu menimbulkan permasalahan sampah yang tidak kecil. Sampah di kota Bandung masih menjadi isu yang perlu diselesaikan bersama, mulai dari sektor pemerintah, akademisi, hingga komunitas. Sebanyak 1.500 ton sampah dihasilkan setiap harinya di Kota Bandung atau 0,63 kg tiap orang per hari. Pandangan terhadap sampah perlu diubah dari 'permasalahan' menjadi 'potensi'. mayoritas jenis sampah yang dihasilkan Kota Bandung adalah sisa makanan sebanyak 44,5 persen, sampah plastik 16,7 persen, karton 13,2 persen dan sampah kain 4,75 persen.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tatanan kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan semacam proporsional, efektif, dan efisien. Untuk mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah tentunya pemerintah daerah Kota Bandung membuat kebijakan, yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung, dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bank sampah awalnya dibentuk dalam rangka mengedukasi masyarakat sekitar, dari anak kecil hingga orang dewasa supaya memiliki kesadaran dalam memilah sampah. Dimana, kegiatan memilah sampah ini dapat membantu dalam meminimalisir sampah yang masuk ke TPA dan supaya sampah yang masuk ke TPA hanya tersisa residu saja. Program bank sampah sebenarnya telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2011, Meskipun jumlah bank sampah semakin banyak, tapi partisipasi masyarakat terhadapnya masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan penduduk. Bank sampah bekerja dengan mekanisme penampungan, pemilahan dan penyaluran sampah yang bernilai ekonomis dengan sistem perbankan. Pengelolaannya sendiri didasarkan pada prinsip 4R (*reduce, recycle, reuse, replace*). Jika telah berdiri, bank sampah dapat menjalin kemitraan dengan banyak pihak, mulai dari pihak swasta, pemerintah maupun komunitas lokal. Untuk memastikan peran aktif perempuan di dalamnya, kemitraan dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat dilakukan. Jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bank sampah dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan limbah yang dibuang ke sungai atau diangkut ke TPA. Selain bank sampah, pembentukan kelompok usaha bersama juga dapat menjadi jalan pengelolaan limbah yang menghasilkan output berdaya jual. Alternatif pengelolaan sampah juga dapat dialihkan kepada alternatif lain, contohnya budidaya maggot yang dapat menguraikan sampah organik.

Permasalahan yang ada di Bank Sampah adalah jumlah nasabah yang menabung berbeda-beda tiap bulannya dikarenakan keaktifan masing - masing nasabah yang berbeda pula. Selain itu, jumlah



nasabah yang ada di bank sampah terhitung masih sedikit yang terdaftar. Hal tersebut mencerminkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah untuk bergabung dalam kegiatan pembangunan berbasis masyarakat di Bank Sampah. Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh Bank Sampah adalah terdapat masyarakat sekitar Bank Sampah yang tidak mau untuk mengikuti kegiatan bank sampah. Kesadaran warga yang masih rendah terhadap kegiatan bank sampah tersebut dinilai berasal dari status ekonomi warga yang rata-rata merupakan warga kalangan menengah ke atas. Padahal pembangunan merupakan upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang belum baik atau kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi (Aprillia Theresia et al., 2014). Maka dari itu, status ekonomi menengah ke atas bukan menjadi suatu batasan untuk melakukan pembangunan terhadap kehidupan bermasyarakat. Fasilitas yang dimiliki oleh bank sampah dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan juga masih kurang memadai, ditinjau dari kegiatannya yang dilakukan di garasi salah satu rumah warga dan alat yang dimiliki hanya timbangan. Pentingnya policy network dalam pengelolaan sampah, khususnya pengelolaan sampah di sumber atau hulu selain pengelolaan di tingkat akhir harus berbasis masyarakat dengan melakukan 3R (Reduce, Recycle dan Reuse).

Jejaring dalam kebijakan memiliki pengertian yang berbeda dengan partisipasi. Jejaring kebijakan bukan hanya menuntut peran serta atau keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan juga hubungan saling menguntungkan di antara partisipan atau aktor, yang dalam kerangka good governance, terdiri atas pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia internasional, Model jejaring kebijakan yang efektif membutuhkan faktor-faktor, sebagai berikut kepercayaan, komitmen, sumberdaya, aturan, sistem nilai, pemimpin yang inovatif, kepentingan publik, serta pemerataan kesempatan. (Mariane, 2018) pembangunan berbasis masyarakat berupaya memaksimalkan peran individu-individu dalam masyarakat guna mengangkat kehidupan mereka sendiri. Hal ini sangat penting, karena kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai jika hanya bergantung pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saja, masyarakat juga harus terlibat aktif di dalam usaha pembangunan yang dilakukan. keunggulan pembangunan berbasis masyarakat adalah adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka di dalam pembangunan. Selain itu, kesadaran juga membuat masyarakat memahami karakteristik mereka seperti apa, terkait geografis daerah lingkungan mereka, agar teknologi yang diberdayakan kepada masyarakat menjadi tepat guna. (Utama, I. M. A., 2008).

Permasalahan Pokok dalam Penelitian ini adalah bahwa di Kota Bandung belum terlaksananya model jejaring kebijakan sebagai fokus kegiatan yang bukan hanya menuntut keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan hubungan saling menguntungkan di antara aktor dalam kerangka good governance antara pemerintah dengan dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai permasalahan yang multidimensi dan lintas sektoral, serta memerlukan keterlibatan semua pihak agar mencapai pembangunan berkelanjutan. Permasalahan diatas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian untuk menganalisis kebijakan pemerintah kota Bandung dan mengetahui Model Jejaring Kebijakan dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.

METODE

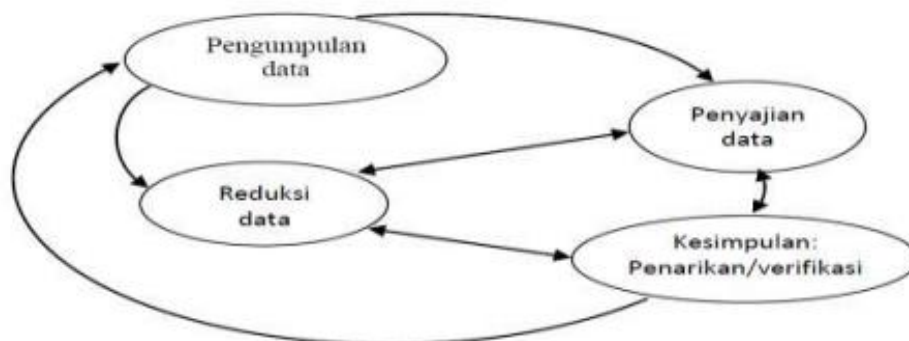
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan fenomenologi. Pengumpulan Data dilakukan melalui :

1. Wawancara Penelitian menggunakan model wawancara semi terstruktur, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, tetapi pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan alur kondisi.
2. Observasi Pengamatan dilakukan dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti mengamati wujud jejaring kebijakan, yaitu kegiatan komunikasi, kerjasama, dan keterlibatan masing-masing aktor dalam pengelolaan bank sampah di kelurahan antapani tengah kecamatan antapani kota bandung
3. Dokumentasi Perolehan data yang berasal dari dokumen-dokumen, baik tertulis atau terekam, terkait dengan objek penelitian yang dapat mendukung peneliti dalam memenuhi, melengkapi, dan mengolah data penelitian.

Data Primer Diperoleh langsung dari wawancara kepada seluruh informan sebagai subjek penelitian yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dan Pengelola Bank Sampah di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung. Data Sekunder ; Data yang digunakan dalam penelitian yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan sampah, Renstra Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan kota Bandung, dan data –data terkait pengelolaan bank sampah di Kota Bandung

Untuk mengecek keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber informasi yang berbeda sehingga peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang valid. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. dari hasil interpretasi data agar mudah dipahami. Analisis data penelitian ini, bila dinyatakan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Komponen Analisis data (Miles dan Huberman, 2007: 20)



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Deskripsi Cakupan Wilayah

Kelurahan Antapani Tengah adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Antapani Kota Bandung provinsi Jawa Barat yang memiliki 24 RW. Penduduk di Kelurahan Antapani Tengah termasuk kawasan padat sebanyak 20.630 jiwa, dengan komposisi jumlah laki-laki 1.043, perempuan 11.286 yang didominasi oleh warga yang terdiri dari pelajar SMA sebanyak 4.926. Mata pencaharian warga masyarakat kelurahan Antapani Tengah 25% sebagai pedagang, 12,5% sebagai pegawai swasta, dan 20% memiliki pekerjaan lain-lain. Rata-rata latar belakang pendidikan warga 22% tamat Sekolah Dasar dan 23% tamat SLTA. Guna lahan di Kelurahan Antapani Tengah seluas 81,34 Ha. Luas tersebut terdiri dari ladang/kebun/kolam 4 Ha, permukiman 65.34 Ha, bangunan lain dan pekarangannya 10 Ha, lahan kosong 0,5 Ha, dan lainnya 1,5 Ha.

Kelurahan Antapani Tengah sudah menerapkan RTPS yaitu rencana teknis pengelolaan sampah yang sudah diterapkan sejak tahun 2020. Sistem ini fungsinya sebagai pengurangan sampah sekaligus menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengolah sampah. Pengelolaan sampah di bina dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, bagaimana supaya sampah di Kelurahan Antapani Tengah bisa terkelola dengan baik. Kebanyakan sampah warga di kumpulkan, diangkut, dibuang sekarang sudah berubah menjadi lebih baik lagi sistemnya seperti sekarang dari rumah sampah sudah di pilah, otomatis sampah yang berpotensi bisa dimanfaatkan kembali tidak dibuang tetapi dikelola langsung oleh Kewilayahan. Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yaitu memonitoring dan memastikan bahwa setiap warga melakukan pemilahan sampah dari rumahnya masing-masing. Rukun Warga 21 Kelurahan Antapani Tengah bersama komunitas Pecinta lingkungan untuk pengolahan sampah aktif berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota, Beberapa bantuan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung berupa tong sampah, sapu dan alat kebersihan lainnya dibagikan kepada RW-RW yang telah melakukan pengelolaan sampah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan bantuan pelatihan *Buruan Sae* yaitu tanaman-tanaman sayuran, dan



budiktember atau budidaya ikan dalam ember. Kelurahan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman memberikan bantuan dana alokasi umum untuk pengelolaan maggot dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle)

Hasil Penelitian Deskripsi Informan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Dalam laporan penelitian ini terdapat 2 informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. 1) Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Penulis akan melaksanakan wawancara untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Antapani Tengah dan apa saja hambatan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Sebagai salah satu peRWakilan pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Kepala Seksi Pengurangan Sampah dijabat oleh Ibu Riri Septiani S.Sos. 2) Petugas tenaga harian lepas di lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Petugas tenaga harian lepas di lapangan ini memiliki tugas memonitoring dan membina masyarakat terkait pengelolaan sampah. Penulis akan melaksanakan wawancara untuk mengetahui bagaimana masyarakatnya dalam mengelola sampah di Kelurahan Antapani Tengah Sebagai salah satu peRWakilan petugas tenaga harian lepas di lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Samsul. 3) Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan & Lingkungan Hidup Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan & Lingkungan Hidup memiliki tugas yaitu mengawasi pengelolaan sampah di Kelurahan Antapani Tengah. Sebagai salah satu peRWakilan pimpinan Kelurahan Antapani Tengah.. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan & Lingkungan Hidup dijabat oleh Bapak Rody. 4) Masyarakat memiliki peran aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pada pengelolaan sampah rumah tangga, masyarakat tentu dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pengelolaan sampah di Kelurahan Antapani Tengah. PeRWakilan dari masyarakat diwakili oleh Bapak H. Doddy Iriana Memed dan ibu Anindya Puspitasari yang mengelola abah timi (abdi milah sampah ti bumi).

Hasil Penelitian tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Kelurahan Antapani Tengah merupakan kawasan bebas sampah (KBS) yaitu merupakan salah satu program kota Bandung dalam upaya pengurangan sampah. Kelurahan Antapani Tengah sudah diterapkan dengan namanya abah timi (abdi milah sampah ti bumi). Gerakan Abah Timi ini fungsinya sebagai pengurangan sampah sekaligus menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengolah sampah. Kebanyakan sampah warga dikumpulkan, diangkut, dibuang sekarang di Kelurahan Antapani Tengah sudah berubah menjadi lebih baik sistemnya seperti sekarang dari rumah-rumah sudah ada pemilahan sampah karena sejak dari rumah sampah sudah dipisah otomatis sampah yang berpotensi bisa dimanfaatkan kembali itu tidak dibuang tetapi dikelola langsung oleh kewilayahan. sampah di masyarakat dikurangi, dipisahkan, manfaatkan. Kurangi yaitu bagaimana caranya supaya mengurangi produk-produk sampah seperti minum tidak memakai gelas plastik. Pisahkan yaitu mulai dari yang organik, anorganik dan residu. Sampah yang sudah dipisahkan oleh masyarakat diangkut oleh tukang sampah (triseda), jika dari kelurahan di angkut dari rumah rumah lalu disimpan di tempat pengolahan sampah. Sampah yang organik diolah oleh petugas pengolahnya yaitu kelompok swadaya masyarakat jasmine, sedangkan anorganik disimpan untuk dibuat seperti kerajinan lalu sampah residu sebanyak 10 % di buang ke TPS.

Berikut capaian terkumpulnya sampah organik dan anorganik di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, sebagai berikut :

Tabel 5.1 Data Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2022

Bulan	Organik	An organik	Jumlah Total
Januari	41.171	6.176	47.347
Februari	38.213	5.165	43.378
Maret	43.460	6.338	49.798
April	38.199	5.744	43.493
Mei	28.375	8.238	36.613
Juni	36.290	7.635	43.925
Juli	37.713	37.713	75.426



Agustus	39.026	39.026	78.052
September	36.604	36.768	73.372
Oktober	33.345	32.741	66.086
November	34.764	34.809	69.573
Desember	34.475	34.475	68.950
Total	441.635	254.828	696.463

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kelurahan Antapani Tengah 2022

Berdasarkan tabel 5.1 bahwa jumlah total pengurangan sampah di Kelurahan Antapani Tengah tahun 2022 sebesar 696.463 kg. Angka sampah organik dan anorganik di Kelurahan Antapani Tengah naik turun karena tingkat konsumsi warga yang berbeda-beda dan dipengaruhi perilaku masyarakatnya mau atau tidaknya masyarakat dalam memilah sampah. Pengelolaan sampah terdapat di Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pasal 3 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui : a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c. Pendaaur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan hasil analisis mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga belum berjalan sepenuhnya dikarenakan ditemukan beberapa masalah yaitu Sumber daya masih manusia yang kurang karena tim lapangan dari dinas lingkungan hidup itu di bagi-bagi kewilayahannya dulu saat RTPS ada 9 orang dari dinas lingkungan hidup sekarang ada 2 orang. Sikap para pelaksana masih ditemukan masalah yaitu kontrol dari 24 RW hanya satu RW yang bisa menggerakkan warganya, sehingga kepemimpinan masih kurang karena kepengurusannya yang tidak bisa memanager warganya untuk mengolah dan memilah sampah. Lingkungan Sosial masih ditemukan masalah yaitu partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang masih kurang.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung

Pembahasan ini berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (Studi Kasus Kelurahan Antapani Tengah), dimana pengimplementasian dari kebijakan pengelolaan sampah akan berpengaruh terhadap pengurangan volume sampah. Analisis yang peneliti ambil dilihat dari hasil wawancara partisipan berdasarkan teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho. 2009:636) dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, 4. Struktur Birokrasi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu sebagai berikut :

Variabel	Hasil Wawancara	Hasil observasi
Standar dan sasaran kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Standar dan sasaran kebijakan sudah jelas pada pengelolaan sampah rumah tangga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 1426 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Peraturan Daerah Nomor 9 	<ul style="list-style-type: none"> standar kebijakan terdapat dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor : 1426 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah jelas. Sasaran kebijakan terdapat di Peraturan Daerah No 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah

	<p>Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, yang berisi bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Bandung bebas sampah dan agar dapat mengelola dengan baik, maka diperlukan kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dinas terkait sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.</p>	<p>terdapat penjelasan mengenai sasaran kebijakan yang tertera pada BAB III Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah pasal 8 yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap aspek pengelolaan sampah.</p>
<p>Sumber daya</p>	<p>sumber daya belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari indikator sumber daya manusia dan sarana prasarana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia kurangnya personal (khususnya tim lapangan monitoring) , untuk pengurangan sampah itu dibantu oleh tenaga kerja dari komunitas Buruan sae dalam mengedukasi masyarakat untuk mengecek pemilahan sampah, • sarana prasarana di Kelurahan Antapani Tengah ada Buruan Sae dengan fasilitas seperti triseda, tong sampah, rumah maggot, tps, tempat pengolahan sampah dan lain sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • sumber daya manusia dari dinas memang kurang personal, lalu di Antapani Tengah memang saat peneliti turun lapangan disana hanya ada 2 orang tim lapangan untuk memonitoring Kelurahan Antapani Tengah dalam pengelolaan sampah. • sarana dan prasarana yang dimiliki Antapani Tengah ada triseda, tps, tpst, kandang maggot, Buruan Sae, kolam ikan.
<p>Karakteristik organisasi pelaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UPT dari sisi regulasi kita disini sudah bagus ada kepala upt, ASN ada 4, bendahara, ada seksi sarana prasarana, seksi pengurangan sampah dan ada seksi kerjasama”. tetapi untuk kekurangannya dari sisi penanganan dan sisi operator. 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sudah disusun dengan baik begitupun juga sudah terbagi tugas-tugas dengan sangat baik; ada kepala upt, ASN ada 4, bendahara, ada seksi sarana prasarana, seksi pengurangan sampah dan ada seksi kerjasama”. tetapi untuk kekurangannya dari



	<ul style="list-style-type: none"> • pola hubungan yang terjalin sudah baik dalam pengelolaan sampah yaitu upt pengelolaan sampah bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup untuk membantu operasional dinas dalam melaksanakan pengelolaan sampah. 	<p>sisi penanganan dan sisi operator.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pola hubungan yang terjalin sudah baik
<p>Komunikasi antar organisasi terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi antar organisasi terkait - prosedur pengelolaan sampah rumah tangga sudah baik “pengelolaan sampah ada penanganan dan pengurangan. Penanganan itu prosedurnya di upt disitu masuknya ada bagian pengangkutan sampah yang membutuhkan tenaga kerja kemudian tenaga pengangkutan dan administrasi, jadi masing-masing bidang mempunyai prosedur pengangkutan sampah sendiri yang dibuang ke tpa, kita bekerjanya dari mulai tps diangkut oleh petugas yang dimiliki oleh upt ataupun disewa oleh upt lalu dibuangnya ke tpa yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi prosedurnya kita harus membayar, sebelum membayar kita harus tau berapa jumlah sampah yang diangkut atau yang dibuang disitu ada catatan hariannya, kemudian kita juga harus membayar pengangkutan, ongkos pengangkutan”. • Koordinasi dan kerjasama antar organisasi jelas; pengelolaan sampah dari rumah sampah diangkut oleh petugas sampah lalu ke tps dari tps diangkut ke 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan kerjasama antar organisasi jelas; pengelolaan sampah dari rumah sampah diangkut oleh petugas sampah lalu ke tps dari tps diangkut ke tpa hal ini langsung dari dinas yang bekerja sedangkan dari rumah ke tps itu RW yang harus membayar retribusi ke upt dalam lainnya dinas harus bayar petugas sampah. Koordinasi dinas yaitu dengan provinsi terkait dengan TPA terutama dalam permasalahan pembuangan sampah yang overload dan truk sampah tidak bisa membuang langsung jadi mereka harus menyiapkan jumlah pembuangan, untuk itu dibutuhkan koordinasi karena memang anggaran disana sudah habis untuk biaya operasional truk dan lainnya maka dari itu mereka koordinasi ke dinas untuk saling membantu kekurangannya agar dinas bisa membuang sampah ke TPA.

	<p>tpa hal ini langsung dari dinas yang bekerja sedangkan dari rumah ke tps itu RW jadi RW yang harus membayar retribusi ke upt dalam lainnya dinas harus bayar petugas sampah. Koordinasi dinas yaitu dengan provinsi terakait dengan TPA terutama dalam permasalahan pembuangan sampah yang overload dan truk sampah tidak bisa membuang langsung jadi mereka harus menyiapkan jumlah pembuangan, untuk itu dibutuhkan koordinasi karena memang anggaran disana sudah habis untuk biaya operasional truk dan lainnya maka dari itu mereka koordinasi ke dinas untuk saling membantu kekurangannya agar dinas bisa membuang sampah ke TPA.</p>	
<p>Sikap pelaksana para</p>	<ul style="list-style-type: none"> • respon dari petugas mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang salah satunya adalah memonitoring pengelolaan sampah di Kelurahan Antapani Tengah, memastikan bahwa setiap RW melakukan pemilahan dari warganya dan tentunya peran RW sangat berpengaruh terhadap konsistensi parstisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Namun masih ada RW yang tidak bisa manage warganya untuk memilah sampah jadi kalo ada RW yang sudah tidak setor sampah organik otomatis RWnya sudah tidak mau lagi 	<ul style="list-style-type: none"> • respon masyarakat; saat dari rumah warga sudah dipilah otomatis pengangkut sampah sudah tidak terbebankan dengan sampah yang ada jadi mereka hanya mengangkut residunya saja. respon para pelaksana belum cukup baik karena masih ada kepengurusannya yang tidak bisa manage warganya untuk memilah sampah namun dari petugas lapangan sudah bagus bisa dilihat dari bagaimana para pelaksana memonitoring, mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk mengolah dan memilah sampah agar program tersebut bisa tercapai • dari masyarakat itu ada mindset yang berubah

	<p>mengurusi berarti harus sama kami.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dari masyarakat itu ada mindset yang berubah bahwa sampah itu bisa menghasilkan, mereka melakukan pengurangan sampah yaitu organiknya diolah lalu anorganiknya dibuat kerajinan lalu yang residu diangkut. Jadi petugas itu tanggungjawabnya dari rumah diangkut ke tps” 	<p>bahwa sampah itu bisa menghasilkan, mereka melakukan pengurangan sampah yaitu organiknya diolah lalu anorganiknya dibuat kerajinan lalu yang residu diangkut. Jadi petugas itu tanggungjawabnya dari rumah diangkut ke tps”</p>
<p>Lingkungan ekonomi, sosial, politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sumber anggaran pengelolaan sampah rumah tangga untuk pengurangan sebetulnya ada dari bpd disini dikeluarkan untuk mengedukasi masyarakat, kita membiayai tenaga-tenaga terampil untuk mengajak masyarakat memilah sampah kemudian kita ada anggaran apbd kemudian disini juga kita menyiapkan sarana prasarana seperti gerobak kemudian tong sampah dan lain-lain”. • Sosialisasi ; sosialisasi dari pa walikota sendiri turun tangan kemudian kita mengundang camat, kelurahan,RW,RT. Pa walikota meminta karena memang ada kendala sampah kita sudah overload jadi sosialisasinya yaitu melalui program kang pisman yaitu kurangi, pisahkan, manfaatkan. Itu kita bisa datang masyarakat atau masyarakat datang ke sekolah kang pisman”. • Dukungan elit politik kalo skala kota program kang 	<ul style="list-style-type: none"> • sumber anggaran terdapat di web PIPPK tentang memberikan dana 100 juta kepada masing-masing kelurahan per RW. • data capaian sampah rumah tangga angka di Kelurahan Antapani Tengah tersebut naik turun karena dipengaruhi mau atau tidaknya masyarakat dalam memilah sampah. • saat ada penumpukan sampah (overload) sekretariat daerah dan pa walikota sudah menghubungkan RW-RW berdasarkan sub wilayah kota untuk mensosialisasikan tentang sampah supaya jangan sampai ada penumpukan sampah dimana-mana.



	<p>pisman ini dirujuk oleh pa walikota, sebelum ini almarhum pa oded punya komitmen dulu pendopo tempat tinggalnya sudah menjalankan kang pisman ini lalu juga sudah memonitoring masyarakat yang sudah memilah sampah”.</p>	
--	--	--

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi yang peneliti dapatkan, maka peneliti menganalisis bahwa :

1. Karakteristik organisasi pelaksana.
Karakteristik organisasi pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Sikap ini dapat dijadikan patokan dari para pelaksana. Hal ini terlihat dari struktur organisasi dan pola hubungan yang terjalin dalam birokrasi, semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
2. Hasil analisis variabel karakteristik organisasi pelaksana sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari indikator struktur organisasi dan pola hubungan yang terjalin. Struktur organisasi sudah baik hal tersebut dilihat bagaimana mereka menjalankan tugas yang sudah tersusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Pola hubungan yang terjalin sudah baik yaitu upt pengelolaan sampah bekerjasama dengan dinas untuk membantu operasional dinas dalam melaksanakan pengelolaan sampah bersama masyarakat.
3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana
Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana merupakan cara yang dilakukan para aparatur pelaksana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari bentuknya sebuah kebijakan. Dalam banyak program, impelmentasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
4. Hasil analisis variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan- kegiatan pelaksana sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari indikator prosedur dan koordinasi kerjasama antar organisasi. Prosedur dalam pengelolaan sampah dari rumah sampah diangkut oleh petugas sampah lalu ke tps dari tps diangkut ke tpa hal ini langsung dari dinas yang bekerja sedangkan dari rumah ke tps itu RW jadi RW yang harus membayar retribusi ke upt dalam lainnya dinas harus bayar petugas sampah. Koordinasi dinas yaitu dengan provinsi terakait dengan TPA terutama dalam permasalahan pembuangan sampah yang overload dan truk sampah tidak bisa membuang langsung jadi mereka harus menyiapkan jumlah pembuangan, untuk itu dibutuhkan koordinasi karena memang anggaran disana sudah habis untuk biaya operasional truk dan lainnya maka dari itu mereka koordinasi ke dinas untuk saling membantu kekurangannya agar dinas bisa membuang sampah ke TPA.
5. Sikap para pelaksana
Sikap para pelaksana yaitu sikap yang dominan dari aparatur kebijakan yang dapat dilihat dari beberapa hal yaitu respon dan pemahaman pelaksana. Sikap para pelaksana sangatlah mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan.
6. Hasil analisis indikator sikap para pelaksana belum cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari indikator respon para pelaksana dan pemahaman para pelaksana. Respon para pelaksana belum baik karena kepengurusan atau RW tidak bisa memanage warganya untuk memilah sampah namun dari petugas lapangan sudah bagus hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana para pelaksana memonitoring, mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk mengolah dan memilah sampah agar program tersebut bisa tercapai. Pemahaman para pelaksana sudah baik hal tersebut dapat dilihat



dari sistem kerja dan pembagian tugasnya sudah jelas sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa petugas harian lepas di lapangan sudah sangat memahami kebijakan tersebut.

7. Lingkungan ekonomi, sosial, politik

Lingkungan ekonomi, sosial, politik yaitu suatu kondisi pemerintah yang sangat berpengaruh penting pada berjalannya kebijakan. Hal ini dilihat dari kondisi ekonomi yang merupakan sumber anggaran, kondisi sosial yang mencakup tanggapan masyarakat dan kondisi politik yaitu kewenangan yang dimiliki oleh pejabat untuk menentukan apakah kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Hasil analisis variabel lingkungan ekonomi, sosial, politik belum optimal hal tersebut dapat dilihat dari indikator sumber anggaran, sosialisasi, dukungan elit politik. Sumber anggaran didukung oleh anggaran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dikeluarkan untuk mengedukasi masyarakat, membiayai tenaga-tenaga terampil untuk mengajak masyarakat memilah sampah, anggaran APBD dan PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan). Sosialisasi belum optimal karena partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat masih kurang karena itu masih perlunya sosialisasi. Sosialisasi tergantung dari kepengurusannya masing-masing mau seperti apa. Dukungan elit politik sudah baik hal tersebut dapat dilihat bahwa pa walikota dan sekda turun tangan langsung ketika ada penumpukan sampah dan langsung menghubungkan ke RW-RW untuk mensosialisasikan tentang sampah.

Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Antapani Tengah

Berdasarkan hasil penelitian seperti tersebut di atas, maka yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Antapani Tengah yaitu butuh pimpinan yang mau mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah terutama dalam kewilayahan, kurang kontrol terhadap pengurangan sampah yang ada di wilayah kepengurusannya, kurangnya partisipasi warga khususnya terkait pemilahan sampah masih ada warga yang tidak mau sama sekali sehingga persentase pemilahan sampah naik turun sehingga belum efektif karena masih terkendala sumber daya manusia atau fasilitasnya masih kurang.

Model Jejaring Kebijakan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kelurahan Antapani Tengah kecamatan Antapani kota Bandung

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kelurahan Antapani Tengah kecamatan Antapani Kota Bandung terlihat bahwa pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat berupaya memaksimalkan peran individu-individu dalam masyarakat guna mengangkat kehidupan mereka sendiri. Hal ini sangat penting, karena kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai jika hanya bergantung pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saja, masyarakat juga harus terlibat aktif di dalam usaha pembangunan yang dilakukan. Dari hal-hal yang telah disampaikan tadi, keunggulan pembangunan berbasis masyarakat adalah adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka di dalam pembangunan. Kesadaran merupakan kunci utama dari suatu tindakan yang sistematis dan rasional yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, kesadaran juga membuat masyarakat memahami karakteristik mereka seperti apa, terkait geografis daerah lingkungan mereka, agar teknologi yang diberdayakan kepada masyarakat menjadi tepat guna. Hasil yang diharapkan selain kesejahteraan masyarakat yang dituju berhasil, tentunya pelestarian lingkungan ekologi juga terjaga.

Dalam penelitian ini perlu diselesaikan bersama menggunakan pendekatan jejaring kebijakan yang melibatkan mulai dari sektor pemerintah, akademisi, hingga komunitas, dimana dalam kegiatan tersebut perlu mengelola relasi aktor yang otonom; menjaga interdependensi dan kerjasama; mengelola sumberdaya bersama; dan memaksimalkan kemanfaatan bersama. Dalam kegiatan ini menghendaki pelibatan warga negara atau masyarakat dalam pemerintahan, baik pada tataran perencanaan sampai pada implementasi kebijakan. dengan bertanggung jawab, mengedepankan etika dan akuntabilitas pada setiap program atau proyek yang ditujukan pada masyarakat dalam kerangka

demokrasi. Model Jejaring Kebijakan Laba-laba memperlihatkan adanya keterbukaan hubungan aktor-aktor antar-koalisi yang terjadi dalam tataran antar-subsistem kebijakan dengan peran penengah sebagai pusat dari jejaring, Sehingga sangat sesuai dipakai dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kelurahan Antapani Tengah kecamatan Antapani kota Bandung. karena bentuk jejaring laba-laba memiliki integritas yang tinggi dan mampu menggerakkan kontribusi seluruh aktor dalam *stakeholder*. Jejaring kebijakan tersebut memiliki karakteristik peran komunitas abah tami yang bertugas menggiring seluruh lapisan masyarakat dengan pemerintah dan akademisi atas dasar kepercayaan, , komitmen, sumberdaya, aturan, sistem nilai, pemimpin yang inovatif, kepentingan publik, serta pemerataan kesempatan untuk menyusun peraturan, anggaran, dan sumber-daya manusia agar dapat mencapai sasaran pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kelurahan Antapani Tengah kecamatan Antapani kota Bandung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kelurahan Antapani Tengah kecamatan Antapani kota Bandung maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dalam upaya pengembangan bank sampah berbasis masyarakat di kelurahan Antapani Tengah kecamatan Antapani kota Bandung belum berjalan sepenuhnya, hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian bahwa berdasarkan teori Van Meter Van Horn dimensi sebagai berikut:
 - a. Sumber daya masih ditemukan masalah yaitu sumber daya manusia yang kurang karena tim lapangan dari dinas lingkungan hidup itu di bagi-bagi kewilayahannya dulu saat RTPS ada 9 orang dari dinas lingkungan hidup sekarang ada 2 orang.
 - b. Sikap para pelaksana masih ditemukan masalah yaitu kontrol dari RW yang masih kurang karena kepengurusannya yang tidak bisa memanage warganya untuk mengolah dan memilah sampah.
 - c. Lingkungan Sosial masih ditemukan masalah yaitu parstisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang masih kurang.
2. Hambatan Jejaring Kebijakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut:
 - a. Perlu pimpinan yang bisa mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah terutama dalam kewilayahan,
 - b. kontrol dari RW yang kurang,
 - c. partisipasi warga yang kurang dalam memilah sampah sehingga persentase naik turun, belum efektif karena terkendala sumber daya manusia,
3. Model Jejaring Kebijakan Laba-laba sangat sesuai dipakai dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kelurahan Antapani Tengah kecamatan Antapani kota Bandung, karena bentuk jejaring laba-laba memiliki integritas yang tinggi dan mampu menggerakkan kontribusi seluruh aktor dalam *stakeholder* memperlihatkan adanya keterbukaan hubungan aktor-aktor antar-koalisi yang terjadi dalam tataran, antar-subsistem kebijakan dengan peran penengah sebagai pusat dari jejaring.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2010), *Research Design: Pendekatan Kualitatif dalam Perspektif*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Chotimah, C. (2020). *Pengelolaan Sampah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*. Jakarta: Akademia Pustaka.
- Elkington, John (1998), *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, Gabriola Island, BC: New Society Publishers
- Elliot, Doren. "Social Work and social Development: Toward an Integrative Model for Social Work Praticce". International Social Work. 1993.



- Fox, T., Ward, H., Howard, B. (2002). *Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study*. The World Bank.
- Gunawan, Alex, 2008, *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif*, buku online.
- Harbani Pasolong, M. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Junaidi, Muhammad, 2013, *Korporasi Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Alfabeta, Bandung.
- Kenny, Susan, 2007, *Developing Communities for The Future*, Thompson, South Melbourne
- Komara, Eko, 2013, *Menakar CSR (Memetakan Potensi Pendanaan CSR Dan Peluang Kolaborasi Dengan CSO)*, HIVOS, IBCSD, Jembatan Tiga, Penabulu Alliance.
- Kotler, Phillip & Nancy, 2005, *Corporate Social Responsibility, Doing The Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley & Son, New Jersey.
- Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Salemba Biru, Yogyakarta ,
- Mariane, Ine, 2018. *Jejaring Kebijakan Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung*, Pandiva Buku, Yogyakarta
- Marind B and Renate Mayntz. 1991. *Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations*,
- Murdiyanto, D. E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Moleong, Lexy J, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Norhadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Semarang
- Noveria, Mita, 2011, *Pertumbuhan Penduduk Dan kesejahteraan*, LIPI Press, Jakarta
- O'Rourke, D. (2004). *Opportunities and Obstacles for Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries*. The World Bank and International Finance Corporation. OECD, 2004, *OECD Principles of Corporate Governance*, OECD Publication Service.
- Payne, Malcolm, (2005), *Modern Social Work Theory*, Palgrave Macmillan, New York.
- Ratnawati, R. V. (2018). *Pedoman Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Rudito Bambang, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung
- Rubin, Herbert J, and Rubin, Irene S (2000), *Community Organizing and Development*, Allyn and Bacon, Massachusetts
- Siporin, M., 1975, *Introduction to Social Work Practice*, Mac Millan, New York.
- Suhartini, et. Al, 2005, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, LkiS Pelita Aksara, Yogyakarta
- Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*; Kumpulan esai Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Sunyoto Usman, 1998, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suparno, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Sedarmayanti, 2012, *Good Governance & Good Corporate Governance*, Mandar Maju, Bandung
- Straussner, Shulamith Lala Ahenberg, 1989, *Occupational Social Work Today, An Overview*, The Haworth Press, New York
- Steurer, R. (2009). *The role of governments in corporate social responsibility: characterising public policies on CSR in Europe*. Springer Science+Business Media, LLC. Suharto, Edi, (2009), *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, Alfabeta, Bandung
- ..., (2010), *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung
- Suharto, Ign 2010, *Program Community Development Dan Peningkatan Kesejahteraan*, Unpad Pres, Bandung
- Syarief Nurdin, Encep D. M. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Maulana Media Grafika.
- Taufiqurakhman, S. M. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wahyudi, Isa et.al, 2011, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, Setara Press & Inspire, Malang

TENTANG PENULIS

Dr. Ine Mariane, M.Si.

NIDN : 0402086801

Dosen Program studi Administrasi Publik dengan kepakaran jejaring kebijakan, lulusan S3 Universitas Padjadjaran, Bandung

Dr. Mira Rosana Gnagey , M.Pd

NIDN : 0406016606

Dosen Program studi Administrasi Publik dengan kepakaran Kolaboratif, Lulusan S3 Universitas Pasundan, Bandung

Muaddah Asad Mohamad Ibrahim Karali

NPM : 202010004

Elsa Hardiyanti

NPM : 202010022

Keduanya merupakan mahasiswa Program studi Administrasi Publik Universitas Pasundan, Bandung

